

MAJALAH FILSAFAT

DRIYARKARA

ISSN 0216-0243

Th. XIX No. 4

KRITIK ILMU DAN ILMU KRITIS

Ilmu-ilmu Sosial-Kemanusiaan
dalam Sorotan Filsafat

Redaksi

Positivisme dan Modernisme

Setyo Wibowo

Fenomenologi dan Ilmu-Ilmu Sosial

da Silva Sarmiento

Hermeneutik Hans Georg Gadamer
dan Ilmu-ilmu Sosial Kemanusiaan

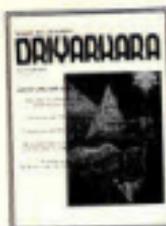
J. Widiantoro

Postmodernisme

Kritik atas Sains dan Filsafat Modern

Hendra Santolo





ed. : Leopold

DRIYARKARA

najalah filsafat
sekolah tinggi filsafat
driyarkara, jakarta

Th. XIX
No. 4
1992/1993

Penerbit
Sekeloa Publikasi
Senat Mahasiswa
STP DRIYARKARA, Jakarta

Pemimpin Umum
Bambang Rudianto

Staf Redaksi
Sudri, Hendra, Julius, Setyo,
Puspito, Mispan, Charles,
Satrio

Sekretaris/Administrasi
Puspito, Yanti, Anison

Keuangan
Ketno

Distribusi
Desy, Guido, Bambang
John da Costa

Ilustrator
Ruhianto
Setyodarmono

Alamat Redaksi
Majalah DRIYARKARA
Jl. Percetakan Negara 31 A
Kotak Pos 1397, Jakarta 10013
Tel. 417129, 4209377

Terbit
4 (empat) nomor setahun

Harga Langganan
Rp. 7.500,- setahun (4 nomor)
bayar di muka, ooran Rp. 2.000,-

Dicetak Oleh
Siem Offset Printing
Kembangan Utara 17 Jakarta
Tel. 4247576, 4248631

DAFTAR ISI

ILMU-ILMU SOSIAL-KERANUSIAAN DALAM SOROTAN FILSAFAT Bari Redaksi	1
POSITIVISME Arus Dasar Modernisme yang Harus Diwaspadai Setyo Wibowo	4
FENOMENOLOGI DAN ILMU-ILMU SOSIAL J.F. da Silva Sarmento	23
PERIKHIRAN HERMENEUTIK HANS GEORG-GADAMER DALAM ILMU-ILMU SOSIAL-KERANUSIAAN Julius Widiantoro	35
POST-MODERNISME Kritik atas Sains dan Filsafat Modern A. Hendra Santosa	49
RALAT	68



STP Driyarkara berdiri 1 Februari 1969. Nama STP diambil dari nama Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara, SJ seorang pakar filsafat Indonesia dan pelopor perkembangan filsafat di kalangan perguruan tinggi. Logo melambangkan bahwa filsafat menuntut baik sifat analitis yaitu sanggup mendalami unsur-unsur permasalahan manusia, maupun sifat sintetis yaitu melihat unsur-unsur itu dalam kesatuannya serta artinya bagi manusia.

ILMU-ILMU SOSIAL-KEMANUSIAAN DALAM SOROTAN FILSAFAT

Locus Permasalahan di Indonesia

Dari Redaksi

Sudah tiga dasawarsa ini, Indonesia secara progresif telah mengadopsi "teori-teori modernisasi" dari Barat khususnya Amerika yang dikembangkan semenjak tahun 60-an sampai sekarang. Proses pembangunan pada kenyataannya menerapkan teori-teori sosial hasil olahan dari Barat. Proses penerapan teori-teori sosial *import* ini kenyataannya telah menghasilkan banyak kemajuan sosial. Akan tetapi mekanisme ini juga telah menghasilkan apa yang kita sebut patologi-patologi pembangunan seperti pencemaran lingkungan, materialisme, sekularisme, seksisme, ketidakadilan, dan dehumanisasi dalam beragam bentuk.

Baru pada akhir abad 20 ini, ilmuwan sosial mulai memikirkan secara serius sebuah teori modernisasi atau teori pembangunan yang cocok untuk sikon Indonesia atau suatu *indigenous theory of modernization*. Teori modernisasi *indigenous* ini diharapkan mampu menjadi teori pembangunan alternatif supaya sekurang-kurangnya patologi-patologi tersebut dapat dikurangi.

Dalam rangka membangun teori sosial *indigenous* ini, kritik epistemologis terhadap ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan dari kacamata filsafat menjadi suatu upaya yang penting. Hal ini mengandaikan bahwa kemajuan ilmu (teori) akan mempengaruhi penerapan ilmu (praksis) dalam realitas sosial. Mungkin saja pandangan ini mengundang banyak keberatan. Sebab ilmu pengetahuan sosial sebagai suatu sistem yang memuat kaidah-kaidah paradigmatis yang valid berlandaskan disiplin ilmiah yang kuat (*self justifying*), belum tentu efektif secara sosial. Dengan demikian validitas ilmiah belum tentu relevan bagi realitas sosial, atau hasil eksperimentasi teori dalam dunia epistemologis belum tentu relevan bagi kepentingan praktis dalam dunia sosial. Yang terjadi di Indonesia adalah bahwa kepentingan praktis, misalnya motif pembangunan, justru lebih mendorong

eksperimentasi teori, dan bukan sebaliknya. Bila hal ini memang benar adanya, bisa dipahami pengamatan banyak pihak bahwa kita memang sedang mengalami kemarau panjang intelektual, miskin eksplorasi, riset, dan eksperimentasi, tidak ada kreatifitas mencipta yang baru. Dan intelektual sosial-kemanusiaan tidak dikecualikan di sini.

Meskipun upaya lebih besar terserap untuk memecahkan masalah bagaimana "menggunakan ilmu" daripada bagaimana "memajukan ilmu", bukan berarti upaya membangun dunia epistemologis yang kuat dan sehat, yakni mempunyai validitas ilmiah meyakinkan dan tidak terlalu mudah tunduk pada dorongan-dorongan dan kepentingan-kepentingan praktis, adalah sia-sia belaka karena tidak ada jaminan bagi relevansi sosial. Justru sebaliknya, upaya memajukan ilmu, betapapun banyak tantangannya, akan menolong perkembangan realitas sosial yang sehat.

Riset-riset ilmu-ilmu sosial di Indonesia pada kenyataannya masih kuat mengandung muatan unsur-unsur naturalisme dan positivisme-empiris. Masyarakat dan gejala-gejala sosial sebagai objek penelitian ilmu-ilmu sosial dengan demikian dilihat sebagai atom sosial. Para peneliti kemudian dengan kepala dingin dapat bebas mengkalkulasi dan mengukur mereka sebagai fakta sosial beku menurut mekanisme hukum-hukum alam. Kemudian mereka dengan bebas pula dapat membuat prediksi-prediksi setepat mungkin menurut sebab-akibat hukum-hukum alam. Cara kerja demikian, akan mampu memperoleh prediksi yang tepat, statis, dan linear. Akibatnya, cara kerja ini tidak peka terhadap nilai-nilai pribadi dan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian sulit pula dibayangkan apakah teori sosial ini akan mampu menjadi sebuah teori transformatif masyarakat yang memajukan sekaligus membebaskan.

Andaikan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan di Indonesia masih berjalan demikian, tentu saja bahaya besar sudah dapat diraba, yaitu pengaruh penerapan ilmu-ilmu tersebut nantinya dalam realitas sosial. Riset yang positivistic ini tidak peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya kritik atas positivisme ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan oleh filsafat sebagai ilmu kritis menjadi penting di sini. Harapan dari kritik ini adalah bagaimana mengatasi kecenderungan positivistic ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan sambil tetap mengusahakan metode ilmu yang dapat secara tepat menangkap dan mengarahkan gejala-gejala faktual masyarakat menurut segi-segi internalnya yang rasional.

Dalam rangka membangun metode ilmu sosial yang kita harapkan tersebut, akan menolong melihatnya dari beberapa pendekatan filsafat. Karangan pertama dalam edisi ini akan membahas masalah sentral positivisme ini, secara khusus mengenai implikasi metode positivistic ilmu sosial bagi realitas sosial modern. Kemudian dua karangan berikut menyumbangkan telaah dari sudut *fenomenologi* dan *hermeneutika*, khususnya hermeneutika linguistik-ontologi Gadamer. Tentu saja dua pendekatan ini belum sepenuhnya dapat tuntas memecahkan masalah positivisme. Karena terbatasnya ruang kami belum bisa menyajikan secara utuh. Namun dari dua karangan ini akan diperoleh kontribusi secara tidak langsung, meskipun masih dalam tahap awal, yang pantas diperhitungkan bagi cara kerja ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan.

Dalam edisi ini Anda juga dapat menikmati hasil refleksi post-modernisme tentang sains dan filsafat dalam karangan terakhir yang berjudul **"POST-MODERNISME: Kritik atas Sains dan Filsafat"**. Tidak kurang serunya bahwa sains dan filsafat pada masa kini mendapat gempuran hebat dari pihak post-modernisme dari sudut ontologi dan epistemologi. Telaah atas masalah ini menghantar kita untuk kritis bukan saja terhadap perkembangan sains dan filsafat sampai sekarang namun juga kritis terhadap bangunan modernisme dan proyek modernitas sekarang yang dibangun di atas fondasi sains dan filsafat modern tersebut. Mungkin karangan ini memiliki rangsangannya sendiri untuk dinikmati di tengah merebaknya pemikiran post-modernisme akhir-akhir ini.

Selamat menikmati!

POSITIVISME

Arus Dasar Modernisasi Yang Harus Diwaspadai

Setyo Wibowo

Pengantar

Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang dicanangkan sebagai momentum lepas landas mau mendasarkan diri pada napas ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat ini Mangunwijaya¹ secara kritis memberi pemikiran bahwa skenario semacam itu membawa bahaya tertentu. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai rasionalitas tertentu dalam cara kerjanya. Rasionalitas instrumental yang inheren dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung bahaya bahwa ia akan mereduksikan manusia menjadi sekedar alat atau sumber daya atau tenaga siap pakai belaka. Manusia akhirnya akan diperlakukan sebagaimana teknologi memperlakukan *software* atau *hardware*-nya.

Lebih lanjut Mangun mengemukakan bahwa dunia modern dan segala paradigma kemajuan dan pembangunannya - yaitu sains dan teknologi, industri dan bisnisnya - sampai hari ini masih dikuasai oleh akal budi subjektif dengan rasio instrumentalnya. Celakanya, paradigma ini (di sini) diberi predikat absolut. Teknologisasi, modernisasi menjadi tuhan baru. Maka, absolutisme paradigma ini kemudian menghasilkan antara lain *bolongnya* ozon, pencemaran lingkungan, hidup di pihak lingkungan alam, dan pelbagai keresahan sosial (pelecehan HAM, pengusuran, kampung kumuh, pemogokan, kekerasan, dll) di pihak lingkungan manusianya. Rasionalitas yang dipilih akhirnya menjadi sebuah irrasionalitas dalam skala besar yang mengerikan, demikian tambah Mangunwijaya. Padahal, dalam pembangunan manusia tetapkanlah sang tujuan dan sang penentu. Secara garis besar, pandangan Mangunwijaya ini menggambarkan secara gamblang problem positivisme dalam ilmu-ilmu sosial yang wajah paling mutakhirnya muncul dalam idiom-idiom modernisasi dan teknologisasi. Manusia tidak boleh dialienasikan, dijadikan instrumen belaka dari sasaran-sasaran di luar dirinya.

¹ Lihat, "YB.Mangunwijaya: Pancasila Relevan Menjadi Pengarah dan Kontrol PJPT II", artikel dalam *Kompas*, Kamis 26 Agustus 1993, halaman 17.

Secara garis besar, pandangan Mangunwijaya ini menggambarkan secara gamblang problem positivisme dalam ilmu-ilmu sosial yang wajah paling mutakhirnya muncul dalam idiom-idiom modernisasi dan teknologisasi. Ada apa di situ? Mengapa Mangunwijaya begitu khawatir? Adakah kaitan antara problem teoritis seputar positivisme dengan soal-soal aktual mengenai "biaya-biaya manusiawi" dalam istilahnya Berger, atau menurut salah seorang menteri: "limbah produksi" dalam ddrap pembangunan-modernisasi?

1. Duduk Perkara: Masuknya Metode Ilmu Alam dalam Ilmu Sosial

Modernisasi secara intrinsik mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi, lengkap dengan segala klaim netralitas dan bebas nilainya. Lewat dua perangkat tadi konsep-konsep dan praktik pembangunan kemudian dijalankan (entah itu dalam kebijakan teknologisasi, birokratisasi, pemanfaatan sehebat mungkin sumber daya alam dan manusia sebagai faktor produksi, dsb). Dua agen pokok modernisasi tadi sering dilihat sebagai entitas netral yang sangat bermanfaat. Konteks historis perkembangan dua agen tadi (yang adalah Barat) sering disingkirkan begitu saja. Banyak pihak sampai sekarang masih terpesona oleh klaim netralitas nilainya tadi.

Padahal, dalam perkembangannya di Barat teori-teori modernisasi adalah hasil ilmu-ilmu sosial yang secara konsisten mau menerapkan metode-metode ilmu alam terhadap realitas sosial. Usaha semacam ini lebih dikenal dengan istilah *naturalisme* (bila lebih menyangkut pada soal metodologi) dan *positivisme* (bila lebih menyangkut pada soal epistemologi). Asumsi naturalistis-positivistis ini memperlakukan realitas sosial sebagai "fakta" sosial, semacam sebagaimana Comte memperlakukan sosiologinya sebagai "fisika sosial". Usaha ini bukan tanpa dasar. Dalam kenyataan, metode ilmu alam telah terbukti handal dalam membawa kemajuan material bagi umat manusia. Berangkat dari situ ada harapan bahwa kalau ilmu sosial mau menjadi "ilmu pengetahuan", ia harus pula memiliki metode/ cara kerja ilmu alam.

Dalam kerangka ini, Anthony Giddens mengemukakan bahwa usaha adopsi metode ilmu alam dalam ilmu-ilmu sosial mempunyai tiga pengandaian yang saling berkaitan yaitu:

- (a) Bahwa prosedur metodologis ilmu alam bisa langsung diterapkan dalam ilmu sosial kemanusiaan, termasuk di dalamnya konsep pendekatan objektif dan bebas nilai terhadap objek penelitian.

- (b) Bahwa hasil penelitian ilmu sosial harus bisa dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum sebagaimana ada dalam ilmu alam.
- (c) Bahwa dengan demikian ilmu sosial harus bersifat teknis, yaitu mampu menyediakan sebuah pengetahuan instrumental murni yang bisa diterapkan secara universal.²

Posisi naturalis-positivistis itu kemudian secara tajam dan tegas dirumuskan oleh Lingkungan Wina yang dalam berbagai riset bidang alam maupun kemanusiaan menganut apa yang disebut *positivisme logis*. Di sini posisi positivistik makin tegas. Hanya fakta-faktalah yang bisa diverifikasi dan bermakna. Yang tidak faktual berarti tidak bisa diverifikasi, berarti *non-sense* (metafisika, estetika dsms masuk dalam kategori *non-sense* ini).

2. Inti Soal Yang Akan Dibahas Makalah Ini

Kembali ke inti problematika seputar modernisasi: term modernisasi mengandung di dalamnya segala macam ilmu sosial yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagaimana dicita-citakan masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang rasional, industrial, berteknologi maju dan yang metode berpikirnya memakai ilmu pengetahuan. Modernisasi yang positivistik (misalnya luas diketahui ada dalam kerangka teori Parsons) ini berusaha mendekati kenyataan dengan memakai metode ilmu alam. Asumsi di balik usaha itu adalah pengandaian bahwa masalah pembangunan adalah masalah teknis belaka. Dengan alat "netral" inilah mereka berusaha mengubah realitas sosial menuju sebuah masyarakat yang lebih modern.

Makalah ini mau menganalisis seputar positivisme dan dampak-dampaknya bila masuk dalam metode ilmu sosial. Dengan demikian kita bisa sedikit lebih jeli dalam memandang pesona modernisasi. Bisa bertanya: benarkah masyarakat hanya bisa didekati secara teknis saja? Apa bahaya dari pandangan ini? Dan, mungkinkah memajukan masyarakat dengan ilmu sosial dengan paradigma alternatif (bukan positivistik)? Mungkinkah/adakah metode ilmu sosial yang mampu

² Lihat Giddens, A (ed.), *Positivism and Sociology*, Heinemann, London, 1975, hl.3-4. Teks ini bisa dilihat juga dalam makalah "Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Sorotan Filsafat Dewasa Ini" yang merupakan catatan seminar "Filsafat Ilmu-Ilmu Sosial" yang diberikan oleh Fransisco B. Hardiman pada semester genap tahun ajaran 1992/1993.

menangkap gejala faktual secara tajam, namun sanggup mengarahkan perkembangan masyarakat menurut segi internalnya, dan bukan eksternal-teknisnya belaka, secara bebas dan rasional?

a. Pengantar Teknis: Beda Ilmu Alam dan Ilmu Kemanusiaan

Sebelum kita memasuki positivisme (sebagai arus besar dalam ilmu alam) secara ketat, supaya panoramanya menjadi lebih jelas, kita lihat dulu perbedaan mendasarnya dengan ilmu sosial-kemanusiaan³.

Ilmu-Ilmu Alam yang mencakup fisika, biologi, kimia dan keturunannya objek kajiannya adalah: proses-proses objektif alam. Metode yang dipakainya adalah hipotetiko-deduktif-nomologis. Artinya, dari data empiris ditarik sebuah hipotesis. Bila hipotesis ini teruji, ia menjadi hukum. Hukum-hukum alam yang serumpun kemudian diabstraksikan lebih lanjut menjadi teori ilmiah. Dalam menjalankan metode ini, sikap subjek peneliti terhadap objek telitiannya - yang eksternal terhadap peneliti dan bersifat kausal - adalah: distansi radikal. Ini tampak dari peran kontrolnya terhadap objek observasional-eksperimentalnya. Motif penelitian adalah *erklaren*, pencarian kejelasan kausalitas objek telitian. Maka, informasi yang diperoleh dari ilmu ini bersifat informatif sekaligus prediktif.

Ilmu sosial-kemanusiaan yang mencakup antara lain sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah, objek kajiannya adalah: fenomena manusia dan masyarakatnya. Metode yang dipakainya bersifat a posteriori. Ketika ia memakai metode pendekatan ilmu alam, ia mengalami kesulitan dalam mendekati "manusia dan masyarakatnya" karena soal interaksi subjek-"objek"-nya, soal ketidaknetralan, dan soal taraf objektifitas. Sejak Dilthey sampai Gadamer dicobalah sebuah metode lain yaitu metode hermeneutika. Tetapi, ia toh masih dikungkung bahaya relativisme. Akhir-akhir ini Teori Kritis mencoba mengatasi relativisme itu dengan sebuah imperatif-emansipasi yang "universal dan objektif". Sikap subjek peneliti terhadap "objek" telitian (yang adalah setaraf dengan dengan subjek sendiri, sebagai sama-sama makhluk tak-terdeterminasi) adalah partisipatif dan *sinnverstehen*. Maka, jenis pengetahuan yang dihasilkan di sini bersifat interpretatif.

³ Bandingkan seluruh perbedaan tersebut dengan Bab III "Cara Kerja Ilmu-Ilmu Empiris-Induksi" dalam *Filsafat Ilmu Pengetahuan* hlm. 27-80.

b. Analisis Atas Positivisme

Istilah positivisme digunakan pertama kali oleh Henri, Comte, de Saint Simon untuk menggambarkan sebuah metode ilmiah dan perluasannya ke dalam filsafat. Setelah diambil oleh August Comte, istilah ini merupakan julukan bagi sebuah gerakan filosofis yang sangat berpengaruh di dunia Barat terutama pada paruh akhir abad 19 sampai dekade pertama abad 20.

Tesis-tesis yang mencirikan positivisme antara lain: sains/ilmu alam adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta adalah satu-satunya dasar sah bagi pengetahuan; bahwa metode filsafat tidaklah berbeda dengan metode sains; bahwa tugas filsafat adalah menemukan sebuah prinsip umum sebagai dasar bagi segala pengetahuan dan menggunakan prinsip-prinsip tadi sebagai dasar pemajuan manusia serta sebagai dasar organisasi sosial. Konsekuensinya, positivisme menolak adanya sebuah daya atau substansi yang "melampaui" fakta dan melampaui hukum-hukum yang ditetapkan oleh sains itu sendiri. Positivisme menentang segala bentuk metafisika. Secara umum, ia juga menolak segala prosedur penyelidikan yang tidak bisa direduksikan kepada metode ilmiah.

Sumber positivisme ini secara filosofis dapat diasalkan kepada karya-karya Francis Bacon (tokoh empiris Inggris) dan kepada para filsuf Pencerahan. Suasana kultural abad 18, dimana revolusi industri dan gelombang besar optimisme akan idea *progress* sedang melanda akibat suksesnya teknologi industri, menyuburkan ide positivistik ini. Positivisme kemudian menjadi program filosofis, ia berusaha menjadikan dirinya sebagai proyek universal umat manusia. Ia mengagungkan sains tanpa menyadari keterbatasan validasi dirinya sendiri. Ia bahkan mengklaim dengan pasti bahwa politik, etikaaa dan agama-agama pada akhirnya harus meruppakan disiplin ilmiah.

Secara dasariah, ada dua macam positivisme. Pertama, *positivisme sosial* - dengan tokohnya Comte dan Mill - yang karakter utamanya bersifat praktiko-politis, dan kedua, *positivisme evolusioner* - yang tokohnya adalah Herbert Spencer - dengan ciri utamanya yang bersifat teoritis. Keduanya sama-sama menganut idea *progress*. Sementara positivisme sosial mendeduksikan ide itu dari penelitiannya tentang masyarakat dan sejarah, positivisme evolusioner mendeduksikannya

dari fisika dan biologi⁴. Selain itu ada pula tipe *positivisme kritis* (biasa disebut kritisisme empiris) yang bisa dibedakan dari kedua aliran besar tadi. Dalam bentuk kontemporeranya, positivisme kritis muncul dalam aliran yang disebut: *positivisme logis* atau *neopositivisme* atau *empirisme logis*. Aliran ini selalu dikaitkan dengan Lingkaran Wina, yang tokoh-tokohnya antara lain Neurath, Carnap dan Mach.

Aliran positivisme mengambil bentuknya yang kritis - pada dekade akhir abad 19 - terutama berkat karya Ernst Mach dan Avenarius. Aliran terakhir ini berbeda dengan positivisme sebelumnya dalam hal konsep, teori hukum-hukum ilmiah, dan teori kausalitas. Selain itu ia juga memberi tekanan pada pentingnya "kemampuan prediksi" pada segala sains sebagai prinsip verifiabilitas empiris terhadap pernyataan-pernyataan ilmiah.

Secara umum, kaum positivis menolak metafisika, epistemologi, etika, dan bahkan menuduh filsafat sebagai *meaningless*⁵. Sikap anti metafisika ini selain karena pertimbangan intelektual - dalam posisinya melawan idealisme Jerman - juga diwarnai unsur politis⁶.

Menurut mereka segala pernyataan harus bersumber dari fakta empiris. Setiap pernyataan yang tidak mempunyai isi faktual, menurut mereka, hanya bersifat tautologis dan tidak menambahi apa-apa pada dunia. Menurut aliran ini, setiap pernyataan haruslah bermakna. Prinsip untuk menentukan bermakna tidaknya sebuah pernyataan adalah: verifikasi. Dengan ini seluruh pernyataan ilmiah haruslah diverifikasikan dengan data empiris. Kelompok ini juga berambisi untuk menyusun sebuah bahasa untuk seluruh ilmu pengetahuan, sehingga semua pengetahuan diharapkan tidak akan terpisah-pisah lagi

⁴ Lihat. *The Encyclopedia of Philosophy*, vol VI. The Macmillan Company and The Free Press, New York. Pg.415-417.

⁵ Lihat. *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol.V. The Macmillan Company and The Free Press, New York. Pg. 52-54.

⁶ Pada saat Lingkaran Wina terbentuk, Austria ada di bawah kekuasaan kelompok sayap kanan konservatif pimpinan pendeta Dalfuss. Partai oposisi yaitu kelompok kiri sosialis berusaha mengambil alih kekuasaan. Neurath dan Carnap termasuk dalam kelompok oposan ini. Juga, karena anggota Lingkaran Wina sebagian besar adalah orang Yahudi, maka oleh kelompok ini juga ditekan oleh penguasa diktatorial Nazi-Hitler. "Lingkaran Mach" ini bahkan pernah dituduh sebagai kelompok subversif. Ketika Nazi-Jerman makin represif para pendukung kelompok ini terpaksa berdiaspora ke Amerika, Inggris dan Belanda. (Dari makalah seminar epistemologi "Positivisme Logis"-nya Bambang Agung, yang diambil dari naskah wawancara dengan AJ Ayer dalam bukunya Bryan Magee *Men of Ideas*)

dan muncul sebuah ilmu pengetahuan terpadu (*unified sciences*). Ini dilakukan misalnya dengan mereduksikan semua pernyataan ilmiah ke dalam bahasa fisika (sebagaimana dilakukan oleh Neurath). Fisikalisme - bahwa ungkapan mengenai perasaan atau pikiran seseorang harus bisa direduksikan ke dalam bentuk pernyataan jasmaniah - ini adalah radikalisme dari fenomenalisme-nya Ernst Mach. Contoh paling kena dari reduksi ini adalah munculnya psikologi Behavioristis.

Oleh karenanya, bagi mereka filsafat bukanlah ilmu empiris. Ia adalah ilmu tingkat dua. Justru kalau filsafat ikut campur dalam menyoroti dunia empiris, menurut kelompok ini, ia akan membuat banyak kesimpangsiuran dalam pernyataan-pernyataan filosofisnya, sebagaimana terbukti dalam sejarah filsafat. Kalau ilmu empiris itu pertama-tama "membicarakan dunia", maka ilmu filsafat itu "membicarakan" ilmu-ilmu empiris yang "membicarakan dunia". Filsafat adalah *talk about talk*.

Jadi, positivisme sebagai epistemologi ini berbicara mengenai bentuk-bentuk dan kondisi-kondisi yang mungkin dalam berpengetahuan.⁷ Ia berkuat dengan soal hakekat pengetahuan yang benar. Ia mengklaim bahwa pengetahuan tentang realitas hanya bisa diperoleh lewat basis pengalaman; dan bahwa obyek pengetahuan hanyalah apa yang *given*/diberikan lewat pengalaman. Ciri utama ajaran ini tampak dalam kesetiaannya terhadap doktrin fenomenalisme dengan pretensi anti-metafisiknya. Ajaran ini merupakan idealisme subjektif, yang menerima dunia objektif sebagai berada bebas dari aktivitas kognitif dan bebas dari sarana berpengetahuan. Posisi ini menekankan pada pendasaran atas pengalaman empiris yang inderawi. Lebih jauh lagi, ia menolak kemungkinan adanya pengetahuan akan obyek yang supra-inderawi. Yang ada di luar fenomena pengalaman bukanlah objek pengetahuan, dan tuturan mengenainya tak-bermakna/*non-sense*. Pengalaman adalah dasar terakhir pengetahuan. Dan, pengetahuan faktual ini adalah sejati karena ia adalah pengetahuan mengenai kenyataan yang memberi potret secara jujur, intelektual, ilmiah, tanpa nilai dan tanpa *interest* tertentu. Dengan demikian ia menampakkan cirinya yang anti-metafisika.

⁷ Lihat, "Positivism: Fact and Theory" dalam Hindess, B. *Philosophy and Methodology in the Social Sciences*, The Harvester Press, Sussex, 1977, p.113-141. Bdk. juga dengan makalah seminar ilmu-ilmu sosial "Positivisme: Fakta dan Teori" yang dibuat oleh JF da Silva Sarmento.

c. Metodologi Positivistik

Jika epistemologi melibatkan konsep tertentu mengenai kondisi-kondisi dan bentuk-bentuk pengetahuan yang mungkin, metodologi adalah usaha untuk mengelaborasi suatu sistem aturan definitif dan prosedur-prosedur bagi pembentukan pengetahuan secara umum dan secara khusus pengetahuan yang ilmiah. Suatu metodologi disebut positivistik kalau aturan-aturannya diturunkan dari epistemologi positivistik dan sesuai dengannya. Di sinilah muncul istilah naturalisme. Dalam kaitannya dengan ilmu sosial-kemanusiaan, paham ini mengatakan bahwa bila ilmu sosial mau mencapai status "ilmu", ia harus memakai metode ilmu-ilmu alam. Metode ilmu alam ini, menurut mereka, akan menghasilkan pengetahuan yang betul-betul faktual. Contoh dalam hal ini adalah John Stuart Mill. Mill, dalam *A System of Logic*-nya mendasarkan metode penelitian mengenai pengetahuan pada prinsip induksi. Keteraturan alam dan hukum sebab akibat universal mendasari pengetahuan manusia, demikian kesimpulannya⁸.

d. Ilmu Sosial Positivistis⁹

Dalam kerangka usaha penerapan metode ilmu alam ke dalam ilmu sosial ini, kita akan berbicara soal ilmu sosial positivistis. Ini adalah sebuah meta-teori ilmu sosial yang mendasarkan diri pada filsafat empirisisme tentang ilmu (dengan model ilmu hipotetiko-deduktif-nya). Beberapa tokoh penganut aliran ini antara lain: Carl Hempel, Karl Popper dan Ernst Nagel.

Empat ciri esensial meta teori yang mempengaruhi model penelitian sosial ilmu sosial positivistis ini adalah:

- a) Membuat pembedaan antara penemuan (*discovery*) dengan validasi (*validation*), metode penjelasannya bersifat deduktif-

⁸ Lihat, "Sistem Logika John Stuart Mill" oleh Irianto dalam **Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu** halaman 33-46. Menurut Mill, setiap data atas terjadinya suatu gejala haruslah dapat diamati secara empiris. Supaya data dan fakta bisa terkumpul secara lengkap, Mill mengajarkan konsepnya mengenai **the uniformity of nature**, sehingga dengan dasar keseragaman ini manusia berhak mengemukakan sesuatu yang berlaku umum (generalisasi) dan melampaui data dan faktanya.

⁹ Menurut parameter sosiologis yang dibuat oleh Tom Campbell dalam **Seven Theories of Human Societies**, sebuah teori sosial dikatakan bersifat positivistik (antinomi dari sifat interpretatif) bila asumsi-asumsi pendekatan terhadap objek telitian yang dibuat oleh teoritikus tidak berbeda dari pendekatan ilmu-ilmu alam (distansi penuh, objektivistis-mekanistik, deduktif-nomologis, dan meneliti eksternalitas faktual saja). Ini diantonomikan dengan pendekatan interpretatif-partisipatif, yang menolak pendekatan positivistik-ilmu alam, yang memperhatikan perihal motivasi, makna, kesadaran dan intensi objek telitiannya.

- nomologis, menggunakan interpretasi Humean yang sudah dimodifikasi dengan gagasan mengenai "sebab-musabab".
- b) Mempunyai keyakinan akan adanya bahasa pengamatan yang netral sebagai dasar bagi pengetahuan yang tepat.
 - c) Meyakini adanya paham kebebasan nilai dalam pengetahuan ilmiahnya.
 - d) mempunyai keyakinan akan adanya kesatuan metodologis antara ilmu-ilmu.

Dalam level praktisnya (dalam praktik politik), ilmu sosial positivis ini mengejawantahkan dirinya dalam apa yang disebut: ilmu kebijakan (*policy science*). Yang dimaksud dengan ilmu kebijakan adalah: seperangkat prosedur yang memungkinkan seseorang menentukan tindakan terbaik secara strategis sehingga dapat digunakan untuk menerapkan suatu keputusan atau mencapai suatu tujuan. Di sini si ahli kebijakan berkepentingan untuk memilih tindakan yang paling efisien sehubungan dengan informasi ilmiah yang tersedia. Jadi, si ahli kebijakan benar-benar menjadi seorang perencana sosial, seorang yang mencari jawaban yang secara teknis betul - membuat keputusan instrumental atas dasar kaidah ilmu - terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Kita nanti akan memasuki lebih dalam lagi kaitan antara positivisme dan elemen rekayasa dalam perubahan sosial.

e. Implikasi Positivisme Dalam Konsepsi dan Praktik

Ada hubungan antara teori positivis mengenai pengetahuan sosial dengan konsepsi mengenai perencanaan dalam praktik politik. Ini bisa dijelaskan dengan menganalisis inti teori ilmu positivis, yaitu keterkaitan antara penjelasan ilmiah dengan prediksi. Dari analisis itu nyatalah bahwa kontrol adalah elemen yang menentukan dalam kegiatan ilmiah.

Dalam proses penjelasan ilmiah, identitas struktural yang mencirikan kegiatan ini adalah model penjelasan deduktif- nomologis.¹⁰

¹⁰ Misalkan seorang ilmuwan mau menjelaskan keadaan E (*explanandum* = yang harus diterangkan). Bagaimana ia melakukan tugas ini? Umum diterima bahwa si ilmuwan dianggap mampu melakukannya apabila ia mampu menentukan faktor penentu penyebab yang mengakibatkan terjadinya E (atau menemukan *explanans* = yang menerangkan). Menemukan penyebab E berarti: menemukan sifat-sifat situasi yang secara bersama selalu mengakibatkan terdinya E. Ada gagasan mengenai keteraturan-tetap

Dalam proses ini unsur prediksi merupakan permukaan dari penjelasan kausal (yang merupakan model terpenting dalam penjelasan deduktif-nomologis). Jadi, sehubungan dengan identitas struktural penjelasan ilmiah - yaitu dalam soal hubungan antara penjelasan kausal dan prediksi - bisa dikatakan bahwa: *suatu penjelasan tidaklah lengkap bila tidak dapat berfungsi sebagai prediksi*. Suatu penjelasan dalam ilmu layak diterima atau tidak disyaratkan oleh kemampuannya untuk memberikan prediksi. Di lain pihak hanya dengan kemampuan memprediksi itulah seseorang bisa mengatakan bahwa ia telah menjelaskan sesuatu. Apa relevansi analisis teoritis mengenai identitas struktural penjelasan ilmiah ini dengan praktik sosial?

Comte pernah menulis: *from sciences comes prevision, from prevision comes control*. Epigram ini menjelaskan dengan ringkas bagaimana konsepsi positivistic berkaitan erat dengan apa yang disebut kontrol. Karena penjelasan ilmiah merupakan sisi-depan dari prediksi, penjelasan ini meletakkan dasar bagi kontrol/pengendalian instrumental terhadap fenomena dihadapannya. Ini dilakukan dengan cara memberikan jenis informasi yang akan memungkinkan orang untuk memanipulasi variabel-variabel tertentu untuk menciptakan atau mencegah terciptanya keadaan tertentu. Jadi, sifat jenis pemahaman yang diberikan oleh penjelasan ilmiah ini memang memberikan sudut pandang tentang sebuah perekayasaan.

Jadi, *ada kaitan erat secara konseptual antara penjelasan ilmiah (positif) dengan pemakaian cara-cara instrumentalis dalam praksis kegiatannya (teknik pengendalian/kontrol, teknik manipulasi objek/rekayasa)*. Tidak bisa tidak, penjelasan ilmiah memberikan kepada manusia kekuatan dan pengetahuan untuk mengendalikan fenomena di hadapannya melalui manipulasi variabel-variabelnya.

dalam metode penjelasan ini, bahwa E harus terjadi dengan adanya fakta-fakta eksplanatoris tertentu. Jika kita telah memahami hal itu, maka apa yang semula tampak sebagai teka-teki, sekarang bukan teka-teki lagi.

Bagannya sbb:	L_1, L_2, \dots, L_m		Umum
	C_1, C_2, \dots, C_n	pernyataan ² -explanans	Khusus
	E	pernyataan-explanandum	

Bagan itu berbunyi: "Apabila L_1 (L_2 dan seterusnya) berlaku, dan apabila C_1 (C_2 dan seterusnya) mengemukakan sesuatu yang berlangsung, maka E menyatakan sesuatu yang terjadi". Bdk. *Filosof Ilmu Pengetahuan* halaman 45-46.

Lebih dalam lagi, hubungan antara bentuk pengetahuan ilmiah dan konsepsi instrumentalisme dalam ilmu dan praktik ternyata merupakan inti dari sifat kegiatan ilmiah itu sendiri. Pengendalian teknis rupanya merupakan bagian kerangka yang membentuk kegiatan ilmiah. Dalam proses penjelasan ilmiah, rupanya konsep "pemahaman" selalu berkaitan dengan pengetahuan mengenai peristiwa lain yang menjadi penyebabnya, atau yang mencegahnya terjadi. Ini dilakukan lewat serangkaian pengamatan hubungan-hubungan nomologis antara peristiwa-peristiwa. Memahami suatu peristiwa (secara ilmiah) hanyalah terjadi sejauh kita memiliki pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengendalikannya. Jadi, kemampuan mengendalikan fenomena merupakan kerangka kerja penjelasan ilmiah.

Ini berkaitan dengan fenomenalisme yang ada dibalik kerangka kerja penjelasan ilmiah. "Dunia" dipandang hanya sebagai dunia fenomena yang dapat diamati (*observable phenomena*), yang tunduk pada hukum umum. Dengan dasar itu, ilmu lalu membentuk "dunia" tersebut dari sudut pandang tentang bagaimana orang dapat mengendalikan dunia itu. Ini kemudian mempengaruhi asumsi mengenai sifat kebenaran dan realitas. Bukan saja bahwa pengetahuan ilmiah itu memberikan dasar bagi pengendalian manipulatif, *tetapi juga bahwa apa yang disebut pengetahuan ilmiah hanyalah pengetahuan yang memberi kita cara untuk mengendalikan fenomena*. Kegiatan mengontrol suatu variabel adalah kegiatan yang mencirikan ilmiah tidaknya sebuah aktivitas kognitif. *Dengan demikian, pengendalian teknis merupakan elemen penting dalam kegiatan ilmiah tersebut*.

Jadi, mengulangi gagasan di atas sambil memperdalamnya, gagasan tentang pemahaman dalam ilmu erat kaitannya dengan gagasan mengenai pengendalian. Kemampuan mengendalikan ini kemudian membentuk salah satu kriteria atas dasar mana seseorang dianggap telah memberikan penjelasan ilmiah yang valid. Konsepsi positivis tentang pengetahuan mengenai kehidupan sosial di dalam dirinya mengandung suatu konsepsi perekayasa-instrumentalis mengenai hubungan pengetahuan tersebut dengan tindakan sosial. Dan munculnya konsep mengenai ilmu kebijakan ini adalah konsekuensi dari pengadopsian ilmu sosial positivis yang dipilih. Inilah struktur a priori asumsi yang membentuk kegiatan ilmiah, dengan implikasi-implikasinya. Dan, ilmu sosial positivis, pengendalian teknis dan industrialisme inilah yang sekarang membentuk kehidupan sosial modern. Gagasan mengenai pertumbuhan masyarakat modern yang

dicirikan oleh pertumbuhan industri tidak bisa dilepaskan dari konsep teoritis mengenai penjelasan ilmiah dengan komponen intinya "pengendalian" dan ilmu kebijakan sebagai anaknya.

3. Kritik Atas Positivisme dan Ilmu Sosial Positivis

Sehubungan dengan konsepsi positivisme dan ilmu sosial positivis serta implikasi yang muncul darinya, ada beberapa kritik yang secara tajam mampu "mendudukan" mereka pada porsi yang sewajarnya.

a. Beberapa Kritik Untuk Positivisme

- a) Doktrin positivisme bahwa pengetahuan hanya bisa dibentuk dari apa yang ada dalam fenomena pengalaman (sudah barang tentu) didasarkan pada konsep-konsep mengenai syarat-syarat terjadinya pengalaman, dan di dasarkan pada suatu konsep mengenai proses pembentukan pengetahuan itu sendiri. Masalahnya kemudian, apakah prasyarat semacam itu sudah *given* dalam pengalaman? Sulit untuk membayangkannya! Jadi epistemologi ini sekaligus khas dan aneh. Epistemologi ini ternyata tetap tergantung secara logis pada konsep mengenai syarat-syarat terjadinya pengetahuan; sementara syarat-syarat itu sendiri tidak diakuinya sebagai objek pengetahuan yang sah/bermakna. Posisi ini tidak mempunyai argumen yang berarti, dan mempertahankannya berarti bersikap dogmatis. Di satu pihak, untuk mempertahankannya orang harus berargumen secara sirkular (dan ini argumentasi yang tidak berarti), di lain pihak dengan begitu orang juga terpaksa mengakui bahwa positivisme juga mempunyai sebuah "metafisika diam-diam". Positivisme yang berbicara mengenai hubungan antara pernyataan ilmu pengetahuan dengan isi *given* tidak bisa menghindarkan diri dari kehadiran sebuah metafisika diam-diam¹¹.

¹¹ Lihat: **Positivism: Fact and Theory**. Selain itu, dengan menganggap hakekat metafisis sebagai tidak real, positivisme ternyata jatuh dalam sebuah "ontologi" juga: yaitu ontologi tentang yang faktual. "Epistemologi yang telah ditolak membalas dendam dengan masalah yang tak terpecahkan yang sekarang harus dihadapi oleh suatu ontologi tentang yang faktual yang secara ironis dipulihkan kembali" (dikutip dari Habermas, J. **Knowledge and Human Interest** dalam buku **Kritik Ideologi-nya** F. Budi Hardiman halaman 127-131).

- b) Sebagai prinsip dasar untuk menentukan bermakna tidaknya sebuah pernyataan: prinsip verifikasi sendiri belum pernah dirumuskan secara eksak, dan statusnya tidak jelas. Lagipula, tidak jelas juga apakah prinsip ini berdasarkan data empiris? Bila tidak berdasarkan data empiris, apakah bermakna? Positivisme menyatakan bahwa "arti sebuah pernyataan adalah metode verifikasinya", sedangkan pernyataan ini sendiri bukanlah pernyataan ilmiah. Jadi?
- c) Upaya reduksionis tidaklah berhasil. Mereduksi hal sehari-hari saja susah, apalagi hal-hal yang kompleks. Bahkan, dalam ilmu alam sendiri ada banyak pernyataan yang bersifat abstrak, dan tidak bisa diobservasi langsung misalnya, elektron, nukleus, proton, gelombang elektromagnetik, dst.
- d) Dalam perkembangan pemikiran selanjutnya, segala usaha untuk menarik proposisi umum dari suatu data yang terbatas dianggap tidak sah. Terbukti, menurut Popper, logika induktif seperti itu tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu prinsip verifikasi sebagai dasar epistemologis positivisme logis juga sukar dipertahankan. Sebagai alternatif untuk verifikasi, Popper mengajukan falsifikasi yaitu metode eliminasi kesalahan secara terus-menerus sehingga keabsahan sebuah proposisi umum semakin kuat. Dengan sikap ini, Popper sekaligus menolak ambisi besar kaum positivis untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan terpadu yang kokoh dan *unified*. Tidak ada ilmu yang lestari. Ilmu selalu bersifat tentatif. Suatu ilmu justru bersifat ilmiah karena kesadaran diri dan pengakuan akan sifat tentatifnya itu.

b. Bahaya Positivisme Dalam Ilmu Sosial

- a) Ilmu semacam ini banyak dianut sekarang. Ia memandang bahwa dunia sosial terbentuk melalui hukum-hukum sosial yang dianggap memiliki kekuatan sendiri dan bekerja dengan caranya sendiri, terlepas dari kehendak manusia. Ini persis mengambil alih prinsip dan metode ilmu alam. Konsekuensi terpenting dari sikap ini tampak dalam kegiatan kontrol dan rekayasa sosial terhadap masyarakat. Peran manusia dalam pembentukan realitas sosial, dalam penentuan kebijakan sosial (partisipasi, demokratisasi) terabaikan. Upaya pembangunan demi kesejahteraan umum kadang menjadi proyek segelintir orang yang "lebih ahli" yang

menamakan diri perekayasa sosial. Ruang dialog umum, demokratisasi, keterbukaan diremehkan di sini.

- b) Dengan logika bahwa "apa yang ada" itu berbeda dari "apa yang seharusnya" - sementara kita menyadari bahwa ilmu hanya menjelaskan kepada kita mengenai "apa yang ada" saja - kita akan segera tahu bahwa yang namanya ilmu tidak bisa memberi penjelasan kepada kita mengenai tujuan atau arah atau nilai-nilai yang harus kita ambil. Dengan demikian seorang ahli ilmu kebijakan pun tidak bisa memutuskan mengenai "apa yang harus dituju" masyarakat. Secara teknis instrumental mengenai caranya ya, secara normatif tidak! Bilamana konsepsi pembangunan hanya diserahkan kepada ahli-ahli rekayasa sosial - yang nota bene hanya menguasai rasionalitas teknis instrumental -, sembari mengangkat topi atas kepakaran teknis mereka itu, kita patut bertanya "kemanakah arah pembangunan manusia seutuhnya, yang berdimensi ekstern-teknis dan intern-batin?"

4. Beberapa Jalan Alternatif

Positivisme dengan elemen kontrol-teknis dan kontradiksi-internalnya pada faktanya sudah merasuki dalam apa yang disebut ilmu sosial positivis. Lalu, bagaimana menghadapi modernisasi yang tak lain adalah buah penuh "pesona" anak dari teori sosial positivis tadi?

a. Usulan Normatif Habermas

Habermas - berbeda dengan para pendahulunya, seperti Marcuse, dari Mazhab Frankfurt generasi I yang menolak teknologi - tidak menolak modernisasi dengan 2 agen pokoknya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun juga, 2 agen modernisasi itu telah berhasil mengemansipasikan manusia dari kendala alam objektif. Perkembangan ilmu dan teknologi - dengan rasionalitas bertujuan (*Zweckrationales Handeln*) sebagai asumsi paling dasarnya - telah menghasilkan kemakmuran ekonomis saat ini. Tetapi, ia tidak setuju bila penitikberatan rasionalitas positivistic ini diteruskan. Berdasarkan analisisnya atas krisis masyarakat kapitalis lanjut (soal keseimbangan ekologis, antropologis dan internasional), ia mengusulkan suatu program penyeimbangan terhadap model modernisasi teknis saat ini. Ia mengusulkan sebuah upaya konstruksi normatif paradigmatis bagi

rasionalisasi bidang praksis komunikatif (moral), untuk mencapai sebuah masyarakat cerdas yang kritis terhadap pembentukan dirinya sendiri menuju masyarakat otonom dan dewasa (*mundigkeit*)¹².

b. Usulan Teori Sosial Brian Fay: Model Kritis¹³

Setelah menelanjangi teori sosial positivis, ia mengajukan "model kritis" ilmu sosial. Kata "kritis" ini jangan terlalu cepat dikaitkan dengan teori sosialnya Marx, ataupun pendirian politis Mazhab Frankfurt yang neo-Marxis. Dalam arti tertentu ia bisa dikaitkan dengan para praktikus mazhab "kritis" sebelumnya, yaitu bahwa ia tidak mengandaikan suatu teori tentang struktur dan perkembangan sosial tertentu atau konsepsi tertentu tentang sifat manusia.

Yang dimaksud "ilmu sosial kritis" adalah ilmu sosial yang berusaha memperhitungkan penderitaan dan kebutuhan yang dirasakan para pelaku di dalam suatu kelompok sosial, dengan cara melihatnya sebagai akibat konflik struktural tertentu di dalam tatanan sosial yang ada. Ilmu sosial ini berusaha menjelaskan konflik tersebut dengan cara memberikan penjelasan historis secara kuasi-kausal mengenai kontradiksi laten antara kebutuhan, keinginan, dan maksud yang diakibatkan oleh tatanan sosial yang ada, dan pemuasan (yang tidak memadai) yang diberikannya. Ilmu sosial yang demikian ini mencoba menunjukkan bahwa *hanya dengan mengkonseptualisasikan tatanan sosial yang ada dengan cara demikianlah, bisa dikatakan bahwa seseorang dapat memahami ketidakpuasan yang dialami oleh anggota tatanan sosial tersebut.*

Model kritis ini akan menjadi bagian dari kehidupan sosial melalui apa yang disebut *peran edukatif* teori sosial: *memberi pene-*

¹² Sehubungan dengan ini Habermas mengusulkan agar unsur-unsur - selain pengembangan rasionalitas teknis -kognitif, evaluatif dan ekspresif dari kebudayaan juga diterjemahkan secara memadai dan seimbang ke dalam sistem dan pranata sosial yang ada. Repotnya, untuk sebuah negara yang masih sibuk dengan pengatasan kendali alamiah objektif seperti Indonesia ini, di mana peran perekayasa sosial dari penguasa sangat kental, konsep "pembangunan" masih berjalan satu arah (atas ke bawah). Belum ada ruang dialog, di mana rakyat bisa berperan dalam diskursus pembangunan ini. (Bdk. "Quo Vadis Proyek Modernisasi" oleh F. Budi Hardiman dalam *Driyarkara* Th. XVIII No. 3; "Apa Arti Krisis Dewasa Ini: Masalah-Masalah Legitimasi Dalam Kapitalisme Lanjut" oleh Edi Mulyono dan "Teknologisasi Di Indonesia Dan Upaya Pembangunan Manusia Seutuhnya" oh Tim Redaksi dalam *Driyarkara* Th. XVIII No. 4). Nada serupa juga bisa dilihat pada "Teknologi dan Sains sebagai Ideologi" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* suntingan Tim Redaksi Driyarkara, Gramedia: 1993, halaman 89-112.

¹³ Lihat, *Teori Sosial dan Praktek Politik*, hlm. 101-126.

rangan kepada pelaku sosial sedemikian sehingga, dengan melihat diri dan situasi mereka secara baru, mereka sendiri dapat memutuskan untuk mengubah kondisi represif yang mereka temukan itu. Di sini, ilmuwan sosial bertugas "membangkitkan kesadaran" para pelaku sosial yang ia teliti, melakukan transformasi kesadaran para pelaku sosial agar makin otonom. Peran sang ahli dalam hal ini adalah: melakukan proses pendidikan subjek-subjek. Inilah letak perbedaannya dengan model positivis. Model positivis, dengan manipulasi instrumentalnya di dalam ilmu kebijakan berusaha mewujudkan agar serangkaian hubungan tertentu dapat bekerja untuk kepentingan dirinya sehingga dapat mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Dalam praktiknya, model kritis ini menuntut adanya aliran bebas ekspresi alami tanpa paksaan baik dari pihak pelaku sosial maupun si ahli teori sosial kritis yang bersangkutan. Wacana semacam ini hanya dapat diinstitutionalisasi dalam bentuk diskusi awam yang demokratis antar rakyat jelata¹⁴.

c. Usulan Perbaikan Internal dari Campbell

Di samping kritik yang tajam terhadap ilmu sosial positivis, harus disadari juga bahwa teori-teori sosial yang ada selama ini memang tidak selalu memadai dalam usahanya menjelaskan kenyataan sosial. Teori sosial tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, kesulitan ini muncul baik dari sudut subjek peneliti maupun objek telitiannya yang senantiasa berubah. Meski begitu, bila teori sosial ini mau mencapai derajat ilmiah, Tom Campbell mengajukan 5 kriteria yang bisa dipakai bila teori sosial ini mau mengupayakan koherensi dan korespondensinya sekaligus.

- a) Ia harus lebih jelas, mudah dipahami, menggunakan *language-game* sehari-hari tanpa jatuh ke bahasa yang "terlalu longgar".
- b) Mengusahakan konsistensi diri artinya, memiliki koherensi internal, dan tidak kontradiktif.

¹⁴ Di sini, Brian Fay memperkuat lagi pendapatnya bahwa tidak ada penjelasan mengenai sifat ilmu sosial yang dapat memadai kecuali secara eksplisit memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan politik. Filsafat ilmu sosial tidak bisa dipisahkan dari filsafat ilmu politik, lebih daripada ketidakbolehan teori sosial dipisahkan dari praktek sosial. (*Teori Sosial dan Praktek Politik* halaman. 126).

- c) Mempunyai kecukupan data empiris, dan sembari mengakui keterbatasan optiknya ini, tidak memudahkan diri jatuh dalam generalisasi berlebihan atas datanya yang terbatas.
- d) Mempunyai kecukupan eksplanatoris, mengusahakan penjelasan "mengapa"-nya sebuah data secara koresponden.
- e) Akhirnya, bersikap terbuka -dalam mengungkapkan muatan rasionalitas-normatif dibalik teorinya, dan bukannya menyembunyikannya.

Epilog

Ada hubungan erat antara apa yang menjadi pemikiran kita dan apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Maka dalam menilai suatu alur pemikiran (dari pihak lain), sikap manusia tidaklah bisa bersifat netral. Pengetahuan/konsep seseorang tentang kehidupan sosial mempengaruhi bagaimana ia menjalankan kehidupannya¹⁵. Jadi dengan ringkas bisa dikatakan bahwa teori sosial yang dianut seseorang/kelompok orang akan mempengaruhi praktik politiknya. Di sinilah letak penting sikap kritis terhadap tokoh-tokoh *the man behind the gun* segala konsepsi pembangunan-modernisasi. Kaitan erat antara teori sosial positivis-modernisasi dengan praktik rekayasa sosial serta biaya perusakan alam dan manusia yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan fakta "sewajarnya" konsekuensi proposisi di atas.

Lebih lanjut lagi, ada keresahan mendalam bahwa gagasan tentang ilmu mempunyai kaitan erat dengan gagasan tentang penggunaannya. Model ilmu positivistik ternyata melahirkan konsep politik dengan pandangan teknologis. Positivisme yang meneriakkan klaim bebas nilai, pada praktiknya ternyata melahirkan model politik yang teknologistis - yang meng-kemuka-kan rasio instrumental - juga. Maka, ilmu-ilmu apa yang sedang dipelajari di Indonesia sekarang ini? Berbahayakah sikap yang mengagung-agungkan ilmu alam, teknologi sembari menekan dan meremehkan ilmu-ilmu sosial budaya yang bersifat ekspresif-intepretatif?

Maka, dalam konteks ini, kita bisa bertanya secara proporsional terhadap pernyataan-pernyataan para *decision makers* di negeri ini yang begitu mengagung-agungkan teknologi, mekanisme pasar, konsep *link*

¹⁵ Lihat Fay, Brian. *Teori Sosial dan Praktek Politik*. London: George Allen & Unwin, 1984, hlm. 2. Bandingkan juga dengan Lohkowitz, N. *Theory and Practice*.

and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha (baca:industri), dan konsep penyediaan sumber daya manusia yang siap pakai (dipakai siapa, untuk kepentingan siapa?, untuk apa?).¹⁶

Memang, ilmu alam telah memberikan jenis pengetahuan tertentu yang membuat manusia bisa mengendalikan lingkungan alami mereka demi kemajuan kemanusiaan. Oleh karena itu, ilmu sosial (yang menjadi begitu penting saat ini) diharapkan juga akan memberi jenis pengetahuan tertentu yang akan memungkinkan manusia mengendalikan lingkungannya, melakukan *social arrangement* supaya menjadi lebih harmonis dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya.

-00000-

16 Menarik untuk menyingkap pernyataan-pernyataan Mendikbud Wardiman Djojonegoro dalam **Tempo** 29 Mei 1993 halaman 80-81 berikut ini. Sehubungan dengan kemungkinan adanya kesenjangan penyediaan pendidikan di kota besar dan daerah ia menjawab: "Jadi, saya berpedoman, biarkan saja bahwa nanti pasarlah yang akan menjawab.... Jadi, sekali lagi, ini persoalan pasar." Dalam kaitan antara pendidikan dan pembangunan, (konsep *link and match*) ia berujar: "Secara jelas, GBHN mencantumkan diadakannya hubungan antara pendidikan dan dunia usaha.... Saya juga menghubungi Menteri Tungky Aribowo, menanyakan rencana perindustrian." Lebih jelas lagi bagaimana konsep pendidikan yang mau ia tanamkan di negeri ini, tampak ketika ia berkomentar soal NKK/BKK yang disinyalir wartawan **Tempo** sebagai membungkam kegiatan politik mahasiswa: "Kalau ada orang yang mengatakan bahwa program NKK/BKK itu mengganggu, saya minta dibuktikan dulu. Apakah bila program itu dihilangkan lalu kesiapan mahasiswa masuk ke sektor ekonomi makin baik? Bagi saya yang penting adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa mandiri. Misalnya mahasiswa dididik untuk mendapatkan teknologi. Sejahat mana dia bisa menyerap teknologi dan kemudian dengan cepat membaktikan diri pada kegiatan ekonomi. Itu yang penting.... Yang penting kan itu, ekonomi.... Jadi lebih baik ya belajar yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi."

Pernyataan senada itu, dengan tekanan pada teknologisasi, juga amat sering kita dengar dari Menristek Habibie. Lebih mengherankan lagi, ketika ternyata pandangan semacam itu bukan sekedar pandangan para *decision makers* negeri ini tetapi bahkan telah merasuk dalam diri seorang mahasiswa tingkat I (Komentar, "NKK/BKK: Jangan Berpikir Negatif", **Tempo** 26 Juni 1993). Tentu saja tidak semua mahasiswa "terasuki" ide-ide positivistik seperti itu (bdk Komentar "NKK/BKK: jawaban Wardiman Sangat Sederhana", **Tempo** 12 Juni 1993). Pernyataan berbau teknologistis semacam itu memang sedang *ago-trend* sekarang ini. Ini memang tidak mengherankan bila melihat latar belakang dua tokoh menteri di atas yang memang berasal dari sebuah institut teknik terkenal Aachen di Jerman. Tetapi lebih mengherankan lagi, ternyata Mangunwijaya pun berasal dari institut yang sama. (**Kompas**, 1 September 1993). Rupa-rupanya "sikap masing-masing" intelektuallah yang akhirnya menjadi tolok ukur penglihatan, bukan latar belakangnya.

Daftar Pustaka:

Budi Hardiman, F.

1990 *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.

Fay, Brian.

1991 *Teori Sosial dan Praktik Politik* (terj). Jakarta: PT Pustaka Utama Graffiti.

Tim Redaksi Driyarkara.

1993 *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.1993 *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

The Encyclopedia of Philosophy,

---- Vol. V dan VI. New York: The Macmillan Company and The Free Press.

Verhaak, C & Imam, Haryono.

1991 *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Majalah Filsafat Driyarkara,

1993 Th.XVIII No.3.

Th.XVIII No.4.

Majalah Tempo,

1993 Th.XXIII No.13. (29 Mei)

1993 Th.XXIII No.15. (12 Juni)

1993 Th.XXIII No.17. (26 Juni)

Kompas,

Kamis, 26 Agustus 1993.

Rabu, 1 september 1993.

Tim Mahasiswa STF Driyarkara,

Makalah-Makalah kuliah "Seminar Filsafat Ilmu Sosial" dan kuliah "Epistemologi" semester genap th. 1992/1994 yang dibimbing oleh F. Budi Hardiman.